

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sejauh ini provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah banyak menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai macam negara, daerah dan organisasi non pemerintah. Kebanyakan kerjasama tersebut kurang begitu mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak kecuali hanya prestise semata.

Kerjasama yang dijalin oleh pemerintah DIY bisa disebut lebih bermanfaat bagi provinsi DIY sendiri daripada kerjasama yang dijalin oleh pemerintah pusat. Salah satu kerjasama yang bermanfaat bagi provinsi DIY adalah kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto, Jepang.

Dalam kerjasama antar daerah tersebut, kerjasama akan lebih bisa menjangkau aspek-aspek yang kurang begitu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Peluang mengadakan hubungan kerjasama antar daerah sedemikian besar mengingat landasan hukum yang diperlukan sudah ada seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Kerjasama tersebut tidak hanya antar daerah dalam negeri saja melainkan juga bisa dilakukan dengan daerah di manca negara, hal ini jelas tercantum dalam Undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah salah satu pelaku hubungan luar negeri. Demikian pula undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional yang mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri.¹

Kyoto, adalah sebuah Prefektur di negara Jepang yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Honshu. Perekonomian prefektur Kyoto sangat tergantung pada sektor pariwisata. Daerah utara Kyoto terdapat usaha perikanan yang maju, sedangkan di tengah-tengahnya terdapat usaha perkebunan dan perhutanan. Nintendo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan juga berbasis di Kyoto².

Gubernur Kyoto pada waktu itu, Yukio Hayashida yang telah banyak mengetahui kondisi DIY karena sewaktu perang dunia II ditugaskan di DIY, memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan Provinsi DIY. Keinginan tersebut disambut baik oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX karena adanya hubungan pribadi antara kedua belah pihak.

Hubungan kerjasama tersebut mulai resmi dilakukan sejak 16 Juli 1985 bersamaan dengan ditandatangani persetujuan hubungan kerjasama persahabatan antara kedua pemerintah provinsi oleh Sri Paku Alam VIII selaku wakil Gubernur DIY dan Yukio Hayashida selaku Gubernur prefektur Kyoto.

Latar belakang utama kerjasama tersebut antara lain yaitu kedua provinsi adalah tujuan wisata baik internasional maupun domestik, lalu kedua ibukota provinsi tersebut pernah dijadikan ibukota negara dan memiliki nilai-nilai perjuangan, serta

¹ Biro Kerjasama Setda Provinsi DIY, *Bunga Rampai Kerjasama Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya* (Yogyakarta: Biro Kerjasama Setda Provinsi DIY, 2006).

² *Kyoto Prefecture* (diakses pada 2 Juni 2008); pada www.pref.kyoto.jp/index_e.html

kedua provinsi memiliki keindahan alam yang dapat diandalkan bagi pengembangan pariwisata dan pendidikan.

Dengan dibangunnya kerjasama persahabatan bertajuk Sister Province tersebut, maka diharapkan kedua belah pihak dapat saling membantu dalam berbagai sektor.

Pada tanggal 27 Mei tahun 2006 terjadi sebuah bencana alam berupa gempa bumi besar yang melanda DIY dan Jawa Tengah. Dampak terparah dari gempa tersebut adalah di kabupaten Bantul dan kodya Yogyakarta. Di sinilah sangat terlihat manfaat dari kerjasama dengan Prefektur Kyoto. Bantuan mulai mengalir dari pemerintah Kyoto mulai dari tanggap gempa sampai masa-masa rekonstruksi.

Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan dan sejauh mana pelaksanaannya merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, dipelajari dan dianalisa untuk kemudian diangkat sebagai topik karya tulis.

Sehubungan dengan itu, dalam rangka penyusunan karya tulis dengan mengambil masalah kerjasama maka penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat pada objek-objek tersebut.

Sesuai dengan topik masalah yang diambil seperti tersebut diatas, maka judul karya tulis atau skripsi yang dipilih adalah: “Realisasi dan Manfaat Kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuandari penulisan ini adalah:

1. Memenuhi kewajiban akademis yang harus ditempuh penulis sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mengetahui sejauh mana manfaat dari kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan teori dan membuktikan hipotesa yang ada.
4. Untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama berada di masa perkuliahan.

C. Latar Belakang Permasalahan

Kerjasama Sister Province, yang terlebih dahulu ditemukan dengan nama Sister City, merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar belakang sejarah atau

jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan.³

Amerika Utara, Australia dan Asia menggunakan istilah Kerjasama Sister City/Province untuk menyebutkannya, sedangkan di Eropa lebih sering menggunakan Kerjasama Kota Kembar.

Kerjasama Sister City yang pertama kali dalam sejarah adalah di benua Eropa, yaitu antara Keighley, Yorkshire Barat (sekarang berada di Inggris) dengan Poix-du-nord, Nord, Perancis pada tahun 1920 menyusul berakhirnya perang dunia pertama. Akan tetapi, kerjasama tersebut belum resmi karena belum mengadakan penandatanganan perjanjian hingga tahun 1986.

Pada perkembangannya, pada tahun 1956, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Dwight Eisenhower. Melaksanakan program “American Sister City Program” dimana program tersebut memacu daerah-daerah di AS untuk melakukan kerjasama.

Kerjasama sister province dan sister city di Indonesia sudah mulai muncul pada tahun 1970-an. Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan kerjasama tersebut, namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh kesamaan, misalnya sama-sama ibukota negara, contohnya Jakarta banyak melakukan kerjasama dengan berbagai ibukota negara dikarenakan sama-sama ibukota negara. Pada tahun 1980-an kerjasama internasional dalam bentuk sister province dan sister city semakin marak. Pada saat ini lebih kurang 100 kerjasama internasional yang

³ *Sister Cities* (diakses pada 3 Agustus 2009); pada www.wikipedia.org/wiki/sister_province

berbentuk sisterhood telah tercatat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dari catatan yang ada, mungkin tidak sampai 15% dari kerjasama tersebut yang berjalan dengan baik, dan tidak sampai 20% berjalan dengan seadanya dan sisanya lebih dari 65% hampir tidak melakukan kegiatan apapun.⁴

Provinsi DIY sebagai salah satu provinsi yang menyanggah keistimewaan di Negara Republik Indonesia tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan kebutuhan untuk membina komunikasi dan interaksi serta hubungan kemitraan baik dengan provinsi lain di Indonesia maupun dengan pemerintah negara lain. Pertimbangan yang mendasari tidak semata-mata dalam upaya menjalin hubungan persahabatan yang saling pengertian di antara provinsi tetapi juga sebagai upaya untuk menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang pelayanan publik⁵.

Harus diakui bahwa setiap Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi DIY dan Provinsi di negara-negara manca pada umumnya menghadapi tantangan yang serupa dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakatnya.

Bagi provinsi DIY tantangan tersebut adalah di satu sisi dihadapkan keterbatasan seperti luas wilayah yang relatif kecil, sumber dana yang terbatas, sumber daya manusia yang masih membutuhkan peningkatan serta kewenangan yang terbatas. Di sisi lain tuntutan masyarakat atas pelayanan yang lebih baik dalam berbagai bidang makin meningkat sejalan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat.

⁴ Usmar Salam. *Dinamika Kerjasama Internasional Provinsi di Indonesia dengan Luar Negeri*. Makalah Lokakarya Cara penanganan Kerjasama Internasional. 2004. Hal 7.

⁵ *Opcit.*

Pemerintah Provinsi DIY diharapkan dapat mengambil manfaat dari adanya perubahan sifat hubungan diplomatik dimaksud, didukung dengan pengalaman Pemerintah Propinsi DIY dalam hubungan kerjasama dengan luar negeri selama ini. Harapan ini tidaklah berlebihan mengingat terbukanya peluang untuk mencari celah dan manfaat dari meningkatnya keakraban masyarakat Internasional. Tatkala tata krama hubungan antar negara pada skala global, baik melalui saluran multi-lateral maupun bilateral, masih didominasi oleh prosedur protokoler yang sangat tegas, formal dan cenderung kaku, kemungkinan untuk menggalang hubungan Internasional bagi unit-unit pemerintahan daerah, swasta dan masyarakat, adalah sedemikian terbatas. Bagian terbesar kontak antar negara dilakukan via saluran diplomatik yang bersifat resmi dan protokoler dimaksud.

Dalam perspektif global provinsi DIY disamping telah menjalin kerjasama dengan Provinsi lain di dalam negeri juga menjalin kerjasama internasional baik yang berupa sister province maupun kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Salah satu dari kerjasama sister province yang dijalin oleh Pemerintah Provinsi DIY adalah dengan Prefektur Kyoto di negara Jepang.

Hubungan kerjasama antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Prefektur Kyoto, Jepang, telah terjalin sejak tahun 1985 tepatnya pada tanggal 16 Juli 1985 bersamaan dengan ditandatangani persetujuan untuk pembentukan Hubungan Kerjasama Persahabatan (MoU) antara kedua pemerintahan propinsi oleh Sri Paku Alam VIII selaku Wakil Gubernur dan Yukio Hayashida selaku Gubernur Kyoto Prefecture, Jepang.

Kerjasama sister province DIY-Prefektur Kyoto dilatar belakangi oleh hal-hal antara lain adanya keinginan Gubernur Kyoto Prefecture Hayashida Yukio yang banyak mengetahui tentang Propinsi DIY sewaktu bertugas di Yogyakarta selama Perang Dunia II. Keadaan ini didukung oleh adanya hubungan pribadi antara Gubernur DIY Hamengku Buwono IX dengan Gubernur Kyoto.

Secara teoritis, kerjasama antar daerah umumnya dan kerjasama dengan daerah di luar negeri khususnya dipandang bermanfaat apabila dapat menumbuhkan persahabatan (friendship) dan saling pengertian (mutual understanding) bagi masyarakat kedua daerah yang bekerjasama. Perbedaan kebudayaan, keadaan geografis, dan ekonomi harus dapat menjadi pendorong kemajuan kerjasama tersebut. Faktor penghambat seperti jarak fisik geografis kedua negara sudah bukan merupakan masalah lagi dikarenakan kemajuan teknologi yang membuat komunikasi jarak jauh menjadi makin mudah dan murah.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “bagaimana realisasi program-program kerjasama dan manfaat apa saja yang diterima oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan terjalinnya kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto?”

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Hubungan Transnasional

Konstelasi hubungan antar negara dalam percaturan internasional era sekarang telah berubah dari pandangan isu “state centric” yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu-isu ekonomi yang lebih menguntungkan. Peran negara dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non negara yang semakin eksis di dalamnya. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor-aktor non negara terhadap interdependensi ekonomi⁶. Kondisi demikian memacu masyarakat negara untuk mengembangkan pola politik luar negerinya supaya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara.

Kerjasama internasional tersebut telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi dengan diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, hal ini makin mendesak pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan dalam negeri umumnya dan daerah di luar negeri khususnya. Dengan melemahnya peranan aktor negara oleh aktor non negara, pemerintah daerah dalam hal ini, maka interaksi antar negara bukan lagi merupakan hubungan internasional melainkan sebagai hubungan transnasional.

⁶ Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal 232.

Richard Falk mendefinisikan hubungan transnasional adalah perpindahan barang, informasi dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan oleh aktor-aktor pemerintah pusat⁷. Transnasional juga dapat diartikan jalur jamak dalam kontak antar masyarakat yang merupakan kondisi dan terjadinya ketergantungan yang kompleks.

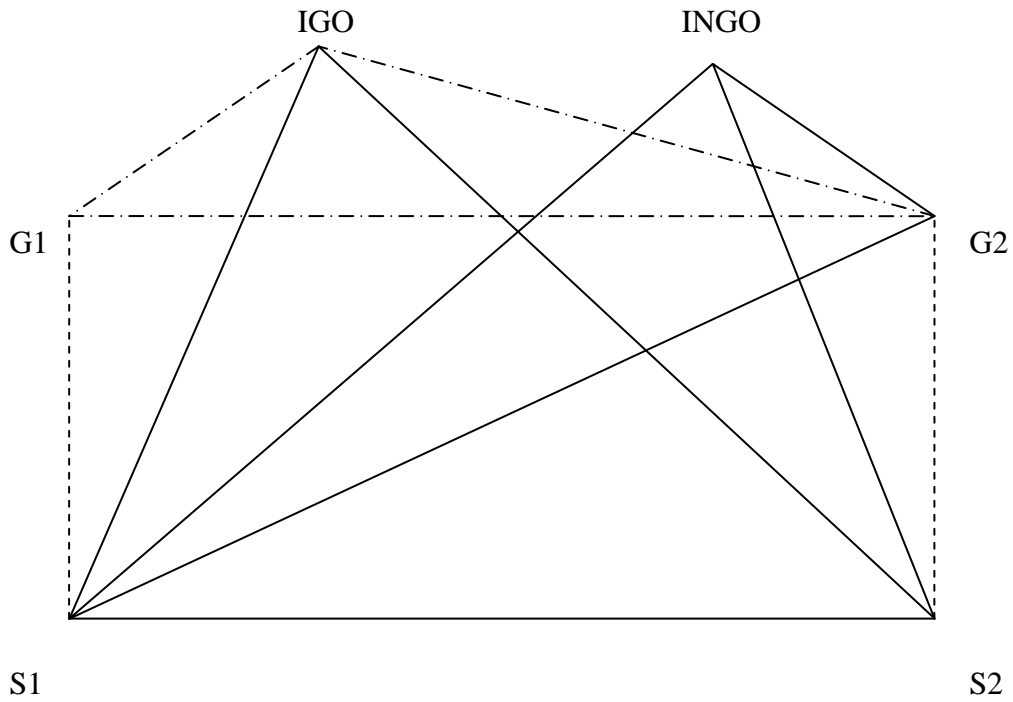
Dari definisi tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan transnasional adalah bentuk pola kerjasama internasional yang di dalamnya tidak lagi didominasi oleh aktor negara melainkan telah digeser oleh peranan aktor non negara yang tidak lagi terbatas oleh batas wilayah suatu negara.

Aktor non negara dalam hubungan kerjasama internasional ini dapat berupa kelompok-kelompok suku, etnis atau separatis di dalam negara, kelompok-kelompok kepentingan, perusahaan multinasional (MNC) serta bagian-bagian dari birokrasi pemerintah pusat.

Pola hubungan transnasional dimaksud dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

⁷ Richard Falk, *A Study of Future World*, dikutip dari Mohtar Mas' oed, *Ibid*, hal 231.

Interaksi Transnasional⁸



Keterangan:

- . - . - . : Politik antar negara

- - - - - : Politik dalam negeri

————— : Interaksi transnasional

G : Government

S : Society

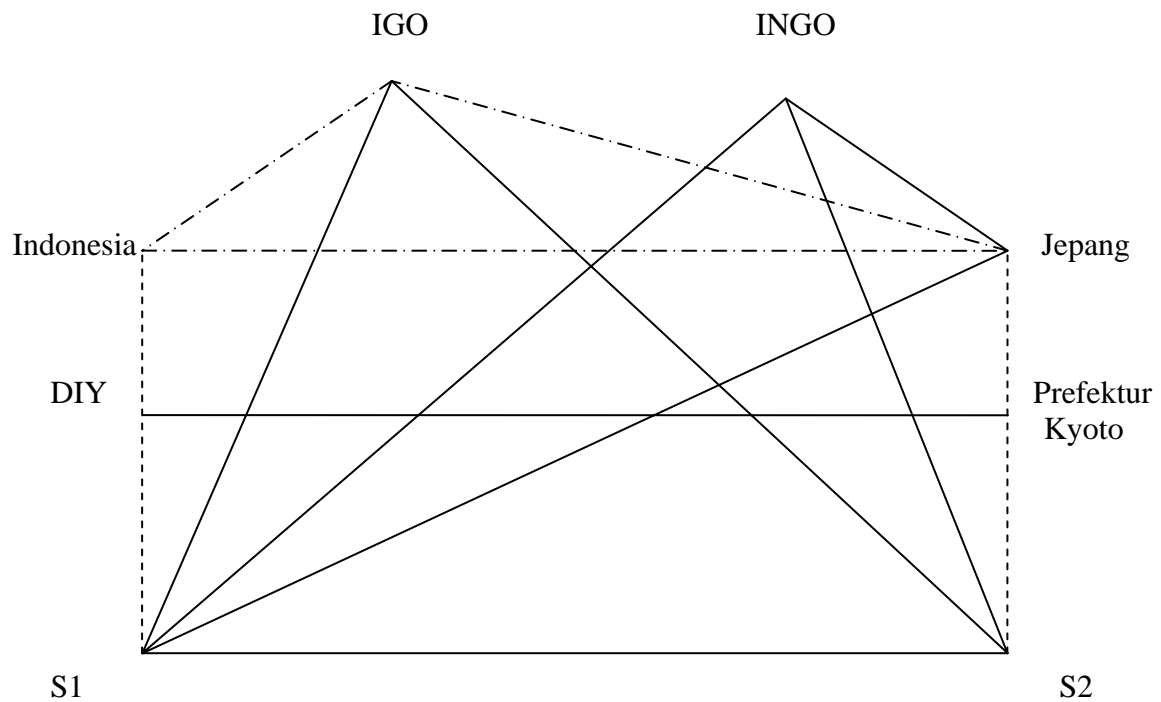
IGO : International Government Organization.

INGO : International Non Government Organization

⁸ Adaptasi dari R O Keohane dan JS Nye, *Transnational Relation and World Politic*, dikutip dari Mohtar Mas'oeed, *Ibid*, hal 232.

Dalam pelaksanaan hubungan tersebut, dapat diketahui bahwa pola hubungan transnasional di atas memungkinkan aktor non negara untuk dapat melakukan interaksi hubungan internasional. Masyarakat suatu negara dapat berhubungan langsung dengan masyarakat negara lain dan organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat melakukan hubungan langsung dengan masyarakat dari suatu negara melalui perantara pemerintah pusat, walaupun hal tersebut tidak begitu vital.

Dengan mengambil contoh kasus yang akan ditelaah, interaksi transnasional yang terjadi adalah antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Prefektur Kyoto. Dalam pola hubungan transnasional diatas, pemerintah daerah atau Local Government terletak antara Government dan Society pada kedua sisi. Local Government tersebut kemudian saling melakukan hubungan transnasional secara langsung dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat yang berupa pelimpahan kekuasaan. Local Government juga dapat melakukan hubungan transnasional dengan INGO. Lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



2. Konsep Kepentingan Nasional

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satupun negara yang mampu hidup sendirian, dan harus diakui bahwa hampir setiap negara mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan sendirian. Dalam penyelesaian masalah tersebut diperlukan hubungan dan atau bantuan dari negara lain untuk berbagai kepentingan nasional dan regional.

Yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian negara-bangsa⁹. Dari definisi tersebut tersirat pula bahwa di dalam kepentingan nasional terdapat pula kepentingan regional. Akan tetapi dalam kaitannya dengan hubungan internasional, maka kepentingan nasional lebih diprioritaskan dibanding kepentingan regional. Dengan kata lain, kepentingan nasional mendahului kepentingan regional¹⁰.

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi amat vital bagi negara. Antara lain mencakup kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, meningkatkan prestise negara, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi¹¹. Di samping itu, kepentingan nasional merupakan faktor dan tujuan yang paling mendasar bagi para decision maker suatu negara dalam merumuskan dan melakukan politik luar negeri.

Politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai di luar batas wilayahnya. Politik luar negeri adalah sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain¹².

Kepentingan suatu negara sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya dan tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan cita-cita

⁹ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations*, dalam bukunya Mochtar Mas' oed, *Ibid*, hal. 16.

¹⁰ *Ibid*, hal. 143.

¹¹ KJ. Holsti, *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis*, hal. 136.

¹² SL. Roy, *Diplomacy*, hal. 31.

nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Strategi dan serangkaian kegiatan yang terencana dan dikembangkan oleh para decision maker suatu negara terhadap negara lain atau terhadap suatu entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang berdefinisi intern bagi kepentingan nasionalnya adalah dengan politik luar negeri dari negara yang bersangkutan¹³. Tujuan politik luar negeri setiap negara pasti berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya berkisar antara perlindungan diri sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan ekonomi.

Dari uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa kepentingan nasional menggambarkan aspirasi suatu negara secara operasional dalam penerapannya berupa tindakan dan kebijakan aktual yang terencana yang ditujukan untuk suatu negara.

Jika dikaitkan dengan tujuan luar negeri suatu negara seperti dijelaskan di atas, maka kepentingan nasional negara manca dalam hal pemberian bantuan luar negeri kepada negara lain, dalam hal ini misalnya Indonesia, lebih diprioritaskan untuk kepentingan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan promosi pariwisata dan percepatan rehabilitasi pasca bencana gempa bumi 27 Mei 2006. Lebih konkrit lagi, bantuan dari negara Jepang kepada Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹³ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, hal. 51.

Kebanyakan transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama¹⁴. Kerjasama dapat terjalin dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Menurut KJ. Holsti, bantuan luar negeri berupa bantuan pinjaman uang, barang atau tenaga penasehat teknis dari sebuah negara donor merupakan instrumen kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad.

Dalam kasus ini, bantuan yang telah diterima oleh pihak DIY adalah di bidang sosial budaya. Sedangkan bentuknya adalah berupa bantuan uang, barang dan tenaga penasehat teknis.

Pada masa lampau, instrumen tersebut tidak hanya digunakan untuk kemaslahatan politik jangka pendek saja, tetapi juga prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Beberapa tipe dari bantuan luar negeri dapat berupa:

- a) Bantuan Militer, yaitu tipe bantuan tertua karena bantuan militer merupakan suatu teknik tradisional untuk mendapat sekutu.
- b) **Bantuan Teknis**, yaitu tipe bantuan yang paling murah karena hanya merupakan bantuan tenaga yang menyalurkan pengetahuan dan keahlian, bukan berupa materi.

¹⁴ *Opcit.* Hal. 209.

- c) **Bantuan Hibah**, yaitu tipe bantuan ekonomi mengenai metode pengalihan modal dan barang yang diberikan secara sukarela dan yang dimaksudkan untuk tidak dikembalikan lagi.
- d) Pinjaman Pembangunan, yaitu tipe bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman modal keuangan, dan bukan bantuan. Negara penerima berkewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman atau beserta bunga dari modal awal selain dana utama yang diterima¹⁵.

F. Hipotesa

Hipotesa yang dapat dikemukakan adalah: “realisasi kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto adalah berupa bantuan teknis yang berwujud pengembangan promosi pariwisata DIY dan bantuan hibah yang berwujud bantuan darurat tanggap gempa bumi, bantuan-bantuan tersebut bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY.”

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian dari penulisan ini dititik beratkan pada bagaimana Kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto dapat memberikan manfaat bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini maka jangkauan penelitian yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan proses penawaran kerjasama, persiapan kerjasama dari kedua belah pihak, realisasi kerjasama dan pemberian bantuan serta

¹⁵ *Opcit*, hal. 245-250.

manfaat dari kerjasama tersebut dari masa 20 tahun terjalannya kerjasama yaitu pada tahun 2005 hingga saat ini.

H. Metodologi Penelitian

a. Data yang Dibutuhkan

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah masalah kerjasama dengan pokok bahasan mengenai manfaat menjalin kerjasama Sister Province dengan prefektur Kyoto terutama pada masa pemulihan pasca gempa bumi yang melanda DIY dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 yang lalu. Dengan demikian maka data yang dibutuhkan sebagai bahan analisa terutama adalah:

1. Data pembentukan kerjasama dan pelaksanaannya.
2. Data bantuan.
3. Manfaat dari bantuan tersebut.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti tersebut di atas, dilakukan dengan menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat, mengabadikan, memeriksa dan mempelajari dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
2. Wawancara (interview) yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada responden. Dalam hal ini adalah kepala subbagian

kerjasama dengan pemerintah dan lembaga luar negeri dari Biro Kerjasama Setda DIY, dan pihak lain yang berkepentingan dengan objek penelitian.

c. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Penelitian lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara lengkap dan reliable sebagai data primer.

2. Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Penelitian perpustakaan adalah penelitian dengan cara membaca, mempelajari berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan landasan teori yang akan diterapkan pada masalah yang diteliti.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menggambarkan atau menguraikan hasil dari pengamatan (observasi terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual), sedangkan kualitatif artinya naratif atau paparan yang secara lahiriah berujud susunan kata dan kalimat yang dituangkan dalam skripsi.

e. Cross Checking Analysis

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data serta hasil analisa dalam penelitian ini maka data primer, data sekunder dan foto-foto rekaman di cross check satu sama lain sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan berikut alasan kenapa hal itu terjadi.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Mengenai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Prefektur Kyoto

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana provinsi DIY dan Prefektur Kyoto secara umum. Mulai dari sejarahnya, pemerintahan, keadaan geografis, perekonomian, kultur, dsb.

BAB III Konsep Kerjasama dan Program Kerjasama Provinsi DIY dan Prefektur Kyoto

Bab ini menjelaskan konsep kerjasama yang dipilih dan diterapkan oleh kedua belah pihak, yaitu kerjasama Sister Province. Serta program-program kerjasama tersebut.

BAB IV Manfaat Kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab ini berisi deskripsi mengenai realisasi dari kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto di DIY yang didalamnya juga akan diuraikan manfaatnya bagi masyarakat DIY.

BAB V Kesimpulan

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN